



SIARAN PERS

Untuk disiarkan segera

Dukungan Semakin Banyak: Naikan Cukai Rokok di Tengah Pandemi agar Indonesia Segera Pulih Kembali

Jakarta, 1 Oktober 2021 – Hari ini, setahun lebih semenjak Indonesia menetapkan kondisi darurat kesehatan masyarakat terkait pandemi Covid-19. Angka positif Covid-19 juga sempat mengalami kondisi naik turun terlebih dengan berbagai kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Namun sayangnya, hingga saat ini pemerintah belum juga mengambil langkah signifikan dalam menekan konsumsi rokok di Indonesia. Padahal, telah banyak pakar kesehatan yang menyatakan kaitan antara perilaku merokok dengan kondisi keparahan pasien Covid-19. Belum lagi, dampak ekonomi yang juga dirasakan masyarakat mulai dari kehilangan pekerjaan dan kehilangan pendapatan, tetapi masyarakat masih memiliki konsumsi rokok yang tetap bahkan di antaranya ada yang meningkat.

Hingga 30 September 2021, terdapat sebanyak total 4.213.414 Kasus Terkonfirmasi positif Covid-19 (+1.954 kasus harian), 37.412 kasus aktif dan 141.826 korban meninggal akibat Covid-19. Di lain sisi, angka vaksinasi juga tetap berjalan dan bertambah. Namun demikian, hal tersebut bukanlah satu-satunya langkah intervensi kebijakan untuk mengakhiri pandemi Covid-19 yang masih menjadi momok bagi Indonesia. Seperti yang kita ketahui, konsumsi rokok adalah faktor risiko utama penyakit-penyakit tidak menular mematikan dan katastrofik, yang diantaranya juga merupakan penyakit penyerta pasien Covid -19 tertinggi, yaitu hipertensi, kardiovaskular, paru kronis, dan kanker. Hal ini didukung penelitian pada 55.924 kasus Covid-19 yang dikonfirmasi di laboratorium menunjukkan, angka kematian kasar pada pasien Covid-19 yang memiliki penyakit bawaan akibat rokok jauh lebih tinggi ketimbang non-perokok (WHO, 2020). Perokok yang terinfeksi Covid-19 dapat berujung dengan perawatan di ICU dan menggunakan ventilator.

Ditambah, meski pandemi, 49,8% masyarakat mengaku tetap mengeluarkan uang belanja untuk merokok bahkan 13,1% masyarakat naik belanja rokoknya (Survei Komnas PT, 2020). Senada dengan survei ini, Fakultas Kedokteran UI menemukan 47,6% responden mempertahankan konsumsi rokoknya dan 20,1% responden justru meningkatkan konsumsi rokoknya pada saat pandemi. Harga rokok yang murah masih menjadi faktor bagi masyarakat tetap bisa dengan mudah mengakses produk beracun ini, meski sedang pandemi. Keparahan kondisi ini kemudian memantik kurang lebih 30 organisasi masyarakat sipil, mahasiswa, dan profesi kesehatan untuk mengirimkan surat dukungan melalui Presiden RI maupun Komisi XI DPR RI agar pemerintah segera menaikkan cukai rokok di tengah pandemi ini.

Terkait hal ini, dr. Erlina Burhan, Sp.P (K), M.Sc., Ph.D, Anggota Satgas Covid dari Ikatan Dokter Indonesia menyatakan, “Pengendalian konsumsi rokok, salah satunya dengan menaikkan harganya semahal mungkin, adalah upaya preventif untuk menekan segala penyakit akibat rokok, termasuk di antaranya dalam penanganan pandemi, pandemi apapun yang bisa saja terjadi di masa depan. Perokok aktif punya tingkat keparahan Covid-19 1,5 kali lebih besar dibandingkan dengan bukan perokok. Merokok dan Covid-19 akan berdampak parah pada kesehatan paru masyarakat.”

Harga rokok di masyarakat masih sangat terjangkau, masyarakat memiliki banyak pilihan produk rokok yang jauh lebih murah, sehingga mereka dapat tetap membeli rokok walau ekonomi sedang sulit. “Meski dalam kondisi pandemi COVID-19, proporsi responden pada kelompok pendapatan terendah (5 juta ke bawah) memiliki intensitas merokok yang sama dengan responden berpendapatan tinggi (10-20 juta). Padahal, pada kelompok pendapatan rendah tersebut, mayoritas responden menyatakan bahwa kondisi keuangan mereka selama pandemi tergolong kurang cukup. Beberapa dari mereka mengubah pilihan rokoknya dan beralih ke rokok yang harganya lebih murah,” jelas Dr. Renny Nurhasana, Peneliti di Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia. Penelitian tersebut juga menyimpulkan kebiasaan merokok di keluarga memberi dampak pada kesehatan keluarga dan kualitas lingkungan rumah, khususnya dampak pada istri dan anak-anak. Bahkan responden menyatakan merokok bukan hanya membunuhmu, tetapi membunuh orang-orang yang kamu cintai, baik fisik, harapan dan perasaan.

Melihat hal di atas, Dr. Abdillah Ahsan, Direktur SDM Universitas Indonesia menyatakan pentingnya penyederhanaan golongan cukai agar harga rokok di pasaran secara signifikan dapat menjadi lebih mahal. “Sangat penting menerapkan simplifikasi golongan tarif cukai rokok seiring kenaikannya. Kalau tidak, kenaikan cukai hanya akan jadi macan ompong dalam pengendalian tembakau dan hanya jadi bulan-bulanan industri saja. Kita juga tidak boleh menyerahkan kesehatan masyarakat pada industri rokok. Negara bisa meningkatkan pendapatan dari cukai rokok bukan dari kenaikan penjualan produk rokok, meningkatkan pendapatan dari naiknya konsumsi rokok adalah hal yang tidak etis dan tidak ada sama sekali UU yang membenarkannya.” ujar Abdillah.

Sesuai RPJMN 2019-2024, target pemerintah menurunkan perokok anak menjadi 8,7% yang hendaknya didukung oleh seluruh kementerian dan lembaga terkait, termasuk dalam kebijakan cukai rokok yang akan menyelamatkan anak-anak Indonesia. “Pajanan asap rokok, baik secara *firsthand*, *secondhand*, maupun *thirdhand*, telah diketahui menyebabkan berbagai gangguan kesehatan dan tumbuh kembang pada bayi, anak, dan remaja, bahkan yang masih dalam kandungan. Ketersediaan rokok dengan mudah dan murah mengancam hak anak untuk hidup, bertumbuh, berkembang, dan berpartisipasi optimal dalam masyarakat, hak yang seharusnya dilindungi sesuai dengan aturan undang-undang. Mari lindungi anak, ciptakan lingkungan bebas pajanan asap rokok. Saya juga berharap semoga tenaga kesehatan tidak dikorbankan untuk bekerja di hilir menyelesaikan masalah rokok ini.” ujar dr. Catharine Mayung Sambo, Sp.A (K) menyampaikan ajakannya.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena memberikan catatan dalam kebijakan cukai rokok ini agar pemerintah juga bisa memfokuskan diri pada isu kesehatan dan ekonomi sekaligus. Menurutnya, pemerintah harus mencari jalan tengah di antara keduanya, “Kenaikan cukai rokok ini adalah sebuah keniscayaan, tidak bisa dihindari. Paling utama memang adalah faktor kesehatan, dengan kebijakan yang komprehensif harapannya dapat mengendalikan konsumsi rokok dan mencegah anak-anak mulai merokok serta tetap dapat memperhatikan tenaga kerja dan pendapatan negara. Regulasi yang sudah ada bisa dipertegas dan dapat mencari solusi yang baik dari reformasi sistem kesehatan yang juga akan diarahkan ke masalah pengendalian konsumsi rokok.” ujar Melki.

Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, Dr.PH, Ketua Umum Komnas Pengendalian Tembakau, menutup konferensi pers bersama ini dengan mengingatkan bahwa apabila Indonesia ingin segera pulih kembali dari dampak pandemi, maka pemerintah harus segera mendengarkan dukungan besar dari organisasi masyarakat sipil terkait dengan kenaikan cukai rokok di tengah pandemi ini. “Bagi para pemangku

kebijakan, jangan sampai terkecoh dengan argumen yang tidak sama sekali menggunakan data yang tepat. Kita harus mulai membuka pikiran dengan objektif bahwa kenaikan cukai rokok pada dasarnya tidak untuk menghancurkan industri melainkan upaya pengendalian konsumsi rokoknya. Bersama dengan ini, ada sekitar 30 organisasi yang telah menyatakan dukungannya kepada Presiden dan DPR dalam surat mereka secara tertulis. Ini artinya, pemerintah tidak perlu khawatir karena dukungan cukup besar, dan secara hitung-hitungan bagaimanapun kenaikan cukai akan menguntungkan semua pihak. Naikkan setidaknya 20%, sederhanakan golongannya, harga rokok mahal, perokok anak turun!” tegasnya.

Mereka yang telah menyatakan dukungan kenaikan cukai 2022:

1. Aliansi Masyarakat Korban Rokok Indonesia (AMKRI)
2. Center for Indonesia's Strategic Development Initiative (CISDI)
3. Fatayat Nahdlatul Ulama (Fatayat NU)
4. Forum Warga Kota Indonesia (FAKTA)
5. Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI)
6. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI)
7. Ikatan Dokter Indonesia (IDI)
8. Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU)
9. Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia (ISMKI)
10. Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat (ISMKMI)
11. Jaringan Perempuan Peduli Pengendalian Tembakau (JP3T)
12. Kita Muda (Smoke-Free Agents - SFA)
13. Komnas Pengendalian Tembakau
14. Kongres Wanita Indonesia (KOWANI)
15. Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI)
16. Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI)
17. Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI)
18. Perhimpunan Onkologi Indonesia (POI)
19. Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI)
20. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)
21. Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS-UI)
22. Wanita Indonesia Tanpa Tembakau (WITT)
23. Yayasan Asma Indonesia (YAI)
24. Yayasan Jantung Indonesia (YJI)
25. Yayasan Kakak, Solo
26. Yayasan Kanker Indonesia (YKI)
27. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)
28. Yayasan Lentera Anak
29. Yayasan Pusaka Indonesia
30. Yayasan Stroke Indonesia (Yastroki)

----- Narahubung: sekretariat@komnaspt.or.id atau (021) 3917354.-----

Tentang Komite Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT):

Merupakan organisasi koalisi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang penanggulangan masalah konsumsi produk tembakau, didirikan pada 27 Juli 1998 di Jakarta, beranggotakan 23 organisasi dan perorangan, terdiri dari organisasi profesi kesehatan, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli akan bahaya produk tembakau bagi kehidupan, khususnya bagi generasi muda dan keluarga miskin. Info: komnaspt.or.id